

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., Febrilyantri, C., dan Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19.
- Diana, A. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009-4020.
- Kesaulya, J., dan Pesireron, S. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Mardiasmo. 2018, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardians (2019). *Perpajakan Fann Meyisi*. Yogyakarta, ANDI
- Michael, A. and Dixon, R. (2019) 'Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap', *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), pp. 188–205. doi: 10.1057/s41310-019-00065-x.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.

- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub- District). *Annual Internasional Conference on Accounting Research (AICAR 2019)* 127:179-182.
- Pratiwi, R., Silalahi, D. A., dan Irma, N. O. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Tanajung Morawa.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., dan Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal : 141.
- Rizki, I. A. (2018). Self Assesment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). *Jurnal Al-'Adl IAIN Kendari*, 11(2).
- Robert, K. dan A. Kinicki. 2005. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.

- Setiawan, D. A., R. Yuliansyah, dan S. R. Mumpuni 2019. The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for
- Sugiyono.2019.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung.
- Sitepu, C. N. B., & Sembiring, M. (2022). Analisis kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal regionomic*, 4(1), 29-34.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 dan 3 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.
- Wilestari, M., dan Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2. *Akrual*, 2(1), 36-54.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., dan Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233-253.